



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Jepara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jepara.
6. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, meliputi:
 - a Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan desa dan RKPDesa;
 - b Prinsip penyusunan APB Desa;
 - c Kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d Teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e Hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan APB Desa, Pemerintah Desa berpedoman pada :
 - a. Standardisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Petinggi berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021.
 - b. Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya

Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021.

- c. Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku Pemerintah Desa dan Standardisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 4

- (1) Harga satuan kendaraan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (2) Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (3) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (4) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak tercantum pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (5) Harga Komputer beserta kelengkapannya, Peralatan Elektronik dan komoditas lain berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (6) Harga Satuan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.
- (7) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan hasil negosiasi dengan Penyedia barang.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi Standardisasi Indeks Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada harga pasar.
- (2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Petinggi.

- (3) Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku Pemerintah Desa dan Standardisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Petinggi.
- (4) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas tertinggi dalam pelaksanaan anggaran.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 November 2020

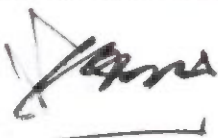
BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN,
KEWENANGAN DESA, DAN RKP DESA.

a) Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten,
Kewenangan Desa dan RKP Desa.

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa. Dokumen RPJM Desa ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 harus sinkron dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2021. Dimana semua jenis Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang ada dalam RKP Desa itu sendiri harus sudah ada di dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa masing-masing Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 wajib disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang Penetapan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan, berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara.

Secara prinsip, semua jenis kegiatan yang ada dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah wajib ada dalam jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yakni:

1. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara Lain:
 - 1) Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa.
 - 2) Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.

- 3) Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.
 - 4) Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
 - 5) Sub Bidang pertanahan.
2. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa antara Lain:
- 1) Sub Bidang pendidikan.
 - 2) Sub Bidang kesehatan.
 - 3) Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
 - 4) Sub Bidang Kawasan permukiman.
 - 5) Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
 - 6) Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
 - 7) Sub Bidang energi dan sumber daya mineral.
 - 8) Sub Bidang Pariwisata.
3. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara Lain:
- 1) Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - 2) Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan.
 - 3) Sub Bidang kepemudaan dan olah raga.
 - 4) Sub Bidang kelembagaan masyarakat.
4. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara Lain:
- 1) Sub Bidang kelautan dan perikanan.
 - 2) Sub Bidang pertanian dan peternakan.
 - 3) Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa.
 - 4) Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
 - 5) Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
 - 6) Sub Bidang dukungan penanaman modal.
 - 7) Sub Bidang perdagangan dan perindustrian.
5. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa antara Lain:
- 1) Sub Bidang penanggulangan bencana.
 - 2) Sub Bidang keadaan darurat.
 - 3) Sub Bidang keadaan mendesak.
6. Pengeluaran pembiayaan, antara lain:
- 1) Pembentukan dana cadangan; dan
 - 2) Penyertaan modal.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 harus memegang prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Capaian atau Target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa Tahun 2021.
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam hal ini penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 harus berpedoman kepada Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 dan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, terkait dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa penganggaran pembayaran penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Penghasilan tetap Petinggi, Carik Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang diambil dari ADD, dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap bagi Petinggi, Carik dan Perangkat Desa Lainnya maka dapat dipenuhi dari sumber lain selain Dana Desa, antara lain dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.
- 2) Besaran Penghasilan tetap Petinggi, Carik Non PNS dan Perangkat Desa lainnya untuk Kabupaten Jepara diatur sebagai berikut :
 - a. Petinggi paling sedikit Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Carik Non PNS paling sedikit Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kamituwo paling sedikit Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Staf paling sedikit Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
 - e. Penghasilan Tetap tidak dibayarkan kepada Petinggi atau Carik yang berstatus PNS.
- 3) Siltap diberikan setiap awal bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Untuk pembayaran tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Selain mendapat penghasilan tetap, Petinggi dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa.
- 2) Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa berupa Tunjangan Jabatan, Tunjangan Istri/suami, Tunjangan Anak, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Ketenagakerjaan, dan Tambahan Tunjangan.

- 3) Tunjangan Jabatan Petinggi dan Perangkat Desa diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa berdasarkan tugas dan fungsi jabatannya yang bersumber dari ADD.
- 4) Pemberian tunjangan Jabatan Petinggi dan Perangkat Desa diberikan selama menjalankan tugas paling sedikit 15 (lima belas) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Jabatan Petinggi paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV a.
 - b. Tunjangan Jabatan Carik Non PNS paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV b.
 - c. Tunjangan Jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kamituwo paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV b.
 - d. Unsur Staf tidak memperoleh tunjangan jabatan.
 - e. PNS yang diangkat menjadi Petinggi atau Carik mendapatkan Tunjangan Jabatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan besaran sebagai berikut :
 1. Petinggi PNS paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV a.
 2. Carik PNS paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV b.
- 5) Tambahan Tunjangan diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dan/atau Non PNS dan Staf yang berasal dari hasil pengelolaan bengkok.
- 6) Tunjangan kesehatan bagi Petinggi dan Perangkat Desa dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - a. Petinggi dan Perangkat Desa beserta anggota keluarga wajib didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu wajib didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
 - b. Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan kesehatan Petinggi dan Perangkat Desa secara kolektif.
 - c. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Petinggi dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% dari gaji/upah perbulan (SILTAP) dengan rincian:
 1. 4% dibayar oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Kabupaten)
 2. 1% dibayar oleh peserta dari SILTAP
 - d. Pemotongan dan penyetoran iuran dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan jaminan kesehatan bagi Petinggi dan perangkat desa.

- 7) Carik PNS diberikan Tambahan Tunjangan sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari hasil pengelolaan bengkok.
- 8) Petinggi atau Perangkat Desa yang habis masa jabatannya dan/atau belum mendapatkan fasilitas jaminan ketenagakerjaan, dapat diberikan penghargaan purna tugas, dengan ketentuan:
 - a. Untuk Petinggi
 1. Masa pengabdian sampai dengan 6 tahun diberikan penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% dari Siltap selama 1 tahun.
 2. Masa pengabdian lebih dari 6 tahun diberikan penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% dari Siltap selama 2 tahun.
 - b. Untuk Perangkat Desa
 1. Masa pengabdian sampai dengan 10 tahun, diberikan penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% dari Siltap selama 1 tahun.
 2. Masa pengabdian lebih dari 10 sampai dengan 20 tahun, diberikan penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% dari Siltap selama 2 tahun.
 3. Masa pengabdian lebih dari 20 tahun, diberikan penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% dari Siltap selama 3 tahun.
- 9) Petinggi atau Perangkat Desa non PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dapat diberikan penghargaan purna tugas yang diterimakan kepada istri/suami atau ahli waris yang sah, dengan ketentuan:
 - a. Petinggi yang meninggal dunia, diberikan penghargaan paling tinggi 5 kali dari SILTAP.
 - b. Carik Non PNS yang meninggal dunia, diberikan penghargaan paling tinggi 4 kali dari SILTAP.
 - c. Perangkat Desa yang meninggal dunia, diberikan penghargaan paling tinggi 3 kali dari SILTAP.
- 10) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud angka 7 dan angka 8 bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan sesuai kemampuan keuangan desa.

Untuk Penjabat Petinggi (Pj. Petinggi) ditentukan sebagai berikut :

- 1) Pj. Petinggi tidak mendapatkan Penghasilan Tetap.
- 2) Pj. Petinggi dapat diberikan tunjangan jabatan sama dengan tunjangan jabatan Petinggi definitif, Tambahan Tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa telah diatur sebagai berikut:

- 1) BPD mempunyai hak untuk mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

- 2) Anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan dari APBDesa, tunjangan tersebut meliputi Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang merupakan tunjangan kedudukan, dan Tunjangan lainnya yang merupakan tunjangan kinerja.
- 3) Tunjangan kedudukan anggota BPD diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD yang ditentukan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan yang bersumber dari APB Desa atau sesuai kemampuan keuangan desa.
- 4) Tunjangan kinerja, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- 5) Penghargaan purna tugas dapat diberikan kepada anggota BPD paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai kemampuan keuangan desa.

D. Teknis Penyusunan APB Desa

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan, penetapan dan pengundangan APB Desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Carik mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Carik menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Petinggi.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Petinggi kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diusulkan Petinggi dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- d. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Petinggi untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam Berita Acara atau notulen musyawarah.

- e. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Petinggi, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, format Peraturan Petinggi sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- f. Atas dasar kesepakatan bersama Petinggi dan BPD, Petinggi menyiapkan Rancangan Peraturan Petinggi tentang penjabaran APBDesa. Carik mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa.
- g. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa kepada Camat dengan Keputusan Bupati. Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
- Ketua : Camat
 - Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Terkait
- h. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Petinggi kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman pada Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- i. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
- 1) Surat Pengantar;
 - 2) Rancangan Peraturan Petinggi tentang penjabaran APBDesa;
 - 3) Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - 4) Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - 5) Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 6) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan (jika tersedia);
 - 7) Peraturan Desa tentang Penyertaan modal (jika tersedia);
 - 8) Berita Acara Hasil Musyawarah BPD;
 - 9) Keputusan BPD tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;

- 10) Daftar Hadir BPD (yang telah memenuhi quorum);
 - 11) Daftar Hadir Pemerintah Desa dan masyarakat.
- j. Camat dapat mengundang Petinggi dan/atau Perangkat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Petinggi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.
 - k. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
 - l. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Petinggi menetapkannya menjadi Peraturan Desa.
 - m. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Petinggi melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - n. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Petinggi dan Petinggi tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Petinggi, Camat mengusulkan pembatalan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati.
 - o. Petinggi memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Petinggi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Petinggi bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Petinggi dimaksud.
 - p. Dalam hal pembatalan, Petinggi hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
 - q. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Petinggi menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa dan kemudian diundangkan oleh Carik dalam Lembaran Desa. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Petinggi menetapkan Rancangan Peraturan Petinggi tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - r. Petinggi menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Petinggi tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk diklarifikasi.

- s. Petinggi menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat : APBDesa, pelaksana kegiatan anggaran, tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan.

2. Substansi APBDesa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa dan APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

1 Pendapatan Asli Desa

Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis :

a. Hasil Usaha Desa:

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa diantaranya bersumber dari hasil usaha Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk itu pemerintah desa dalam penganggarannya agar memperhatikan peraturan desa masing-masing tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

b. Hasil Aset Desa

Hasil Aset desa antara lain berasal dari pengelolaan tanah bondo deso, bengkok, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pendapatan desa yang bersumber dari pengelolaan tanah bondo Deso dan bengkok agar dimasukkan ke dalam pendapatan desa secara

wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan Tahun 2021. Pendapatan dari pasar desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik desa bersumber dari retribusi pemanfaatannya. Untuk itu penganggarannya agar direncanakan secara wajar dan terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan Tahun 2020.

Khusus pendapatan dari hasil pengelolaan bengkok yang mana sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa digunakan sebagai tambahan tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa.

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa yang dapat berupa barang, jasa atau uang dan dimasukkan ke dalam rekening kas desa dicatat sebagai pendapatan asli desa.

d. Pendapatan Asli Desa lain

Penganggaran Pendapatan asli Desa lain antara lain bersumber dari pungutan desa. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pungutan Desa diperbolehkan setelah desa menetapkan peraturan desa tentang Pungutan Desa, dimana rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama BPD serta harus dievaluasi oleh Bupati. Besar pungutan desa agar disesuaikan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat setempat.

2. Pendapatan Transfer

Kelompok Pendapatan Transfer terdiri atas jenis :

a. Dana Desa

Memperhatikan ketentuan Pasal 30A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap,

penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada asumsi besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan/atau Peraturan Bupati Jepara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Maksud diberikannya dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan diberikannya dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Penganggaran pendapatan dari BHPR untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Alokasi Dana Desa

Penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada asumsi pendapatan ADD Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati tentang besar alokasi dana ADD Tahun Anggaran 2021.

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat bersifat umum dan khusus serta dikelola dalam APB Desa.

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai besaran alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2021.

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara:

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara dapat bersifat umum dan khusus serta dikelola dalam APBDesa.

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jepara didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Jepara mengenai besaran alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal informasi diterima setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa maka penganggarannya ditetapkan dalam Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APBDesa kemudian selanjutnya menjelang akhir tahun anggaran ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

f. Pendapatan Lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Lain terdiri atas:

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga : Penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APB Desa.
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Desa dan terdapat pendapatan lain selain yang telah disebutkan diatas maka dimasukkan pada pendapatan lain desa yang sah.

B. Belanja

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan Belanja Desa ini harus diarahkan digunakan

untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Pedoman penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Pedoman penyusunan APB Desa harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa agar berupaya menetapkan target capaian sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa.

Komposisi penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif RT dan RW;
 - 2) Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) Pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 - 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi, Carik dan Perangkat Desa Lainnya;
 - 2) Tunjangan dan operasional BPD.

Penganggaran belanja dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan bidang dan sub bidang yang dirinci dalam

jenis belanja Pegawai, belanja barang Jasa, Belanja Modal dan belanja tak terduga.

C. Pembiayaan Desa

Dalam penyusunan APB Desa harus menguraikan secara rinci hal-hal yang perlu diperhatikan dari sisi pembiayaan, yang meliputi:

- (1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali dana cadangan; dan
- (2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan meliputi : SiLPA tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa yang paling sedikit memuat : penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Petinggi.

Program dan Kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Cadangan meliputi : pengisian/penjaringan/penyaringan Petinggi dan Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau

kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Desa. Pengelolaan Dana Cadangan Desa dilaksanakan melalui rekening Dana Cadangan Desa pada bank pemerintah. Rekening Dana Cadangan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Petinggi dan Kaur Keuangan. Nomor rekening Dana Cadangan Desa dilaporkan Petinggi kepada Bupati lewat Camat.

Penyertaan Modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal BUMDesa secara mayoritas dimiliki oleh Desa. Tata cara penyertaan modal pada BUMDesa diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi :

- a. Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUMDesa; dan/atau
- b. Adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUMDesa.

Indikator analisa kelayakan penyertaan modal meliputi:

- a. Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa yang mengatur tentang organisasi pengelola BUMDesa dan/atau struktur organisasi BUMDesa, modal usaha BUMDesa, Jenis Usaha BUMDesa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan pengisian calon pengurus BUMDesa;
- b. Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa yang memuat paling sedikit:
 1. jumlah modal yang disertakan;
 2. mekanisme pengembalian modal;
 3. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 4. hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara kelembagaan; dan
 5. jangka waktu penyertaan modal.

Penetapan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa dengan mempertimbangkan :

- a. proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUMDesa;
- b. kajian mengenai Proyeksi keuntungan BUMDesa dengan memperhatikan:

1. Aspek Sumber Daya Manusia;
2. Aspek Ekonomi; dan
3. Aspek Sarana dan Prasarana.

3. Cara mengisi format APBDesa

Cara mengisi format APBDesa Tahun 2021 pada dasarnya mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara tentang Pengelolaan keuangan Desa yang mana secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

E. Hal-hal Khusus Lainnya

Hal-hal Khusus Lainnya menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Jepara, yakni sebagai berikut:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 serta penerapan adaptasi kebiasaan baru di desa.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum Perubahan APBDDesa. Dalam hal anggaran sisa penghematan belanja akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan APBDDesa.

Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa antara lain yaitu terjadinya bencana alam, bencana non alam, kerusakan, adanya perubahan peraturan perundang-undangan, keadaan yang menyebabkan estimasi penurunan penerimaan dalam APBDDesa yang signifikan sehingga pelaksanaan APBDDesa tidak dapat dipertahankan. Perubahan APBDDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa dan tetap mempedomani RKPDesa.

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APBDDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa ditetapkan.

Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Petinggi memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APBDDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APBDDesa.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDDesa.

3. Dalam hal Petinggi diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atau Petinggi meninggal dunia, dimana sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Pj. Petinggi sampai ditetapkannya Petinggi Antar Waktu hasil musyawarah Desa. Biaya Pemilihan Petinggi antar waktu dibebankan pada

APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Petinggi Antar Waktu berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan desa.

F. Contoh Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa



PETINGGI ...
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
 15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
 16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
 17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
 18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
 19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
 21. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
 22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
 23. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... - ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
 24. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa ... Tahun 2020 Nomor ...);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan

PETINGGI ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | Rp..... |
| Surplus/Defisit | <u>Rp.....</u> |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp..... |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.....</u> |
| Selisih Pembiayaan (a- b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal; jika tersedia
- c. daftar dana cadangan; jika tersedia dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. jika tersedia

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Petinggi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

PETINGGI

.....
(Nama Tanpa gelar)

Diundangkan di ...
pada tanggal

CARIK ...

..... (nama tanpa gelar)

LEMBARAN DESA ... TAHUN 2020 NOMOR

Noreg Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... : (Noreg)/(nama desa)/(tahun)

LAMPIRAN PERATURAN
DESA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN
2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ...
TAHUN ANGGARAN 2021

| KODE REKENING | | | | | | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | SUMBER DANA |
|---------------|---|---|---|---|--|--------|----------------|-------------|
| 1 | | | 2 | | | | | |
| a | b | c | a | b | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

.....
PETINGGI

TTD
(.....)

G. Contoh Format Rancangan Peraturan Peninggi tentang Penjabaran APBDesa



PETINGGI ...
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN PETINGGI
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Peninggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Peninggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

- 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor ...);
 15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
 16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
 17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
 18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
 19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
 20. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
 21. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di

- Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
 23. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... - ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
 24. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa ... Tahun 2020 Nomor ...);
 25. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa ... Tahun 2020 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PETINGGI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

| | |
|---|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp..... |
| b. Transfer | Rp..... |
| c. Lain -lain Pendapatan yang sah | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Belanja | Rp..... |
| Surplus/(Defisit) | <u>Rp.....</u> |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp..... |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.....</u> |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Petinggi ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Petinggi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

PETINGGI

..... (*Nama Tanpa gelar*)

Diundangkan di ...
pada tanggal

CARIK ...

..... (*nama tanpa gelar*)

BERITA DESA ... TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN
PETINGGI
NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ...
TAHUN ANGGARAN 2021

| KODE REKENING | | | | | | | | URAIAN | KELUARAN / OUTPUT | | ANGGARAN (Rp.) | SUMBER DANA |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------------------|--------|----------------|-------------|
| 1 | | | | 2 | | | | | VOLUME | SATUAN | | |
| a | b | c | a | b | c | d | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

.....
PETINGGI

TTD
(.....)

H. Contoh Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa



PETINGGI ...
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

- 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor ...);
 15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
 16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
 17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
 18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
 19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
 20. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
 21. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di

- Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
 23. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... - ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
 24. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa ... Tahun 2020 Nomor ...);
 25. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan

PETINGGI ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. ... (...), bertambah/berkurang sejumlah Rp. ... (...) sehingga menjadi Rp. ... (...) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp.....
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.....
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
 - a. Semula Rp.....

| | |
|--|---------|
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp..... |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp..... |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | |
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp..... |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp..... |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1- 3.2) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

PETINGGI

.....
(Nama Tanpa gelar)

Diundangkan di ...
pada tanggal

CARIK ...

..... (nama tanpa gelar)

LEMBARAN DESA ... TAHUN 2020 NOMOR

Noreg Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... : (Noreg)/(nama desa)/(tahun)

I. Contoh Format Rancangan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Perubahan APB Desa



PETINGGI ...
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN PETINGGI
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1035);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor ...);

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
23. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... - ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
24. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa ... Tahun 2020 Nomor ...);
25. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa ... Tahun 2020 Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun 20.. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa ... Tahun 20.. Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PETINGGI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. ... (...) bertambah/berkurang sejumlah Rp. ... (...) sehingga menjadi Rp. ... (...) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| 1.1 Pendapatan Asli Desa | |
| d. Semula | Rp..... |
| e. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah PADesa setelah perubahan | Rp..... |
| 1.2 Transfer | |
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp..... |
| 1.3 Lain -lain Pendapatan yang sah | |
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan | Rp..... |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| 2.1 Penyelenggaraan Pemerintah Desa | |
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |
| 2.2 Bidang Pembangunan | |
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |
| 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |
| 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |
| 2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | |
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp..... |

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

- a. Semula Rp.....
- b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah setelah perubahan Rp.....

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

- a. Semula Rp.....
- b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah setelah perubahan Rp.....
- Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Petinggi ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Petinggi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

PETINGGI

..... (Nama Tanpa gelar)

Diundangkan di ...
pada tanggal

CARIK ...

..... (nama tanpa gelar)

BERITA DESA ... TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN PETINGGI
 NOMOR ... TAHUN 2020
 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA ...
 TAHUN ANGGARAN 2021

| KODE REKENING | | | | | | | | SEMULA | | | MENJADI | | | BERTAMBAH/(BERKURANG) | SUMBER DANA |
|---------------|---|--------|--------|---|---|--------|--------|--------|-------------------|---|----------------|--------|-------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | | | URAIAN | KELUARAN / OUTPUT | | ANGGARAN (Rp.) | URAIAN | KELUARAN / OUTPUT | | |
| | | VOLUME | SATUAN | | | VOLUME | SATUAN | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | | | | |
| a | b | c | a | b | c | d | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

.....
 PETINGGI

TTD
 (.....)

- J. Contoh Format Rancangan Peraturan Peninggi tentang Pengeluaran Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa



PETINGGI ...
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN PETINGGI
NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

PENGELUARAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
SEBELUM DITETAPKANNYA PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan guna memperlancar pelaksanaan kegiatan belanja yang sifatnya rutin untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menyusun Peraturan Peninggi tentang Pengeluaran Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebelum Ditetapkannya Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PETINGGI TENTANG PENGELUARAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBELUM DITETAPKANNYA PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Jepara.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD ... Kecamatan ... Kabupaten Jepara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
6. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa.
7. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Peraturan Petinggi adalah peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi dan bersifat mengatur.
10. Keputusan Petinggi adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.

BAB II
BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Belanja operasional Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 adalah merupakan pengeluaran dari rekening kas desa yang sifatnya rutin dan dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan oleh Petinggi, maka Peraturan Desa tentang APB Desa tidak dapat ditetapkan oleh Petinggi.
- (2) Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Belanja rutin operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi belanja operasional perkantoran.
- (2) Belanja Operasional Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pengadaan Alat Tulis Kantor, pembayaran penggunaan listrik dan operasional kantor lainnya yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan pagu anggaran APB Desa Tahun 2020.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Petinggi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

PETINGGI

..... (Nama Tanpa gelar)

Diundangkan di ...
pada tanggal

CARIK ...

..... (nama tanpa gelar)

BERITA DESA ... TAHUN 2021 NOMOR

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 64 TAHUN 2020

Tanggal: 30 November 2020

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB Desa,
DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBD Desa

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa APBDesa adalah merupakan landasan hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa harus ada kesepakatan bersama antara Petinggi dan BPD.

Meskipun Desa mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, maka kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Desa perlu ada yang harus mendapat evaluasi dari Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta tata cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah desa yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

D. Ruang lingkup evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa, dengan RPJM Desa dan RKP Desa.
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa dan Perubahan APBDesa, Camat membentuk Tim Evaluasi dari unsur Staf Kecamatan yang bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.

- 2) Susunan Tim evaluasi terdiri dari :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan unsur UPT Kecamatan terkait
 - 3) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa.
 - 4) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dibentuknya Tim Evaluasi tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Camat.
- b. Dokumen Evaluasi
- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama antara Petinggi dan BPD disampaikan oleh Petinggi kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - 2) Penyampaian rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan dokumen pendukung evaluasi sebagai berikut:
 - a) Surat Pengantar;
 - b) Rancangan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa;
 - c) Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - d) Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - e) Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - f) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan (jika tersedia);
 - g) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal (jika tersedia);
 - h) Berita Acara Hasil Musyawarah Desa;
 - i) Keputusan BPD tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa;

- j) Daftar Hadir anggota BPD dalam Musyawarah Desa (yang telah memenuhi quorum);
 - k) Daftar Hadir Musyawarah Desa dari unsur Pemerintah Desa dan masyarakat.
- 3) Hasil evaluasi terhadap Ranperdes APB Desa atau Ranperdes Perubahan APB Desa dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dimaksud.
 - 4) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi Ranperdes APB Desa atau Ranperdes Perubahan APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Petinggi melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu :

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada huruf E angka 1 huruf b angka 2 di atas telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi paling lama 2 (dua) hari kerja.
- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada pihak-pihak yang terkait;

- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- 5) Langkah Evaluasi
 - Langkah 1: Dapatkan dokumen yang terdiri dari :
 - a) Surat pengantar Petinggi;
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c) Keputusan BPD tentang Kesepakatan Atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 - d) Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - e) Berita Acara Musyawarah Desa dan Daftar Hadir Rapat Musyawarah pembahasan rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa;
 - Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
 - Langkah 3: Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
 - Langkah 4: Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama;
 - Langkah 5: Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APB Desa

1) Evaluasi Kebijakan APB Desa.

Untuk mengevaluasi kebijakan APB Desa, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APB Desa tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Langkah 1: Dapatkan dokumen yang terdiri dari :
 - a) Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

b) Dokumen RKP Desa tahun bersangkutan;

- Langkah 2: Teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang urusan antara APB Desa dengan RKP Desa;
- Langkah 3: Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa antara APB Desa dengan RKP Desa;
- Langkah 4: Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

2) Evaluasi Struktur APBDesa

Evaluasi struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisis indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek pendapatan sebagai berikut:

1. Kelompok pendapatan asli desa, terdiri atas jenis :
 - a. Hasil usaha.
 - b. Hasil aset.
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong.
 - d. Pendapatan asli desa lain.
2. Kelompok transfer, terdiri atas jenis :
 - a. Dana Desa.
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.
 - c. Alokasi Dana Desa.
 - d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
3. Kelompok pendapatan lain, terdiri atas jenis :
 - a. Penerimaan dari hasil kerjasama desa.
 - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
 - c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
 - d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan.

e. Bunga bank.

f. Pendapatan lain desa yang sah.

Selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Jepara tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Langkah evaluasi pendapatan :

- Langkah 1 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Langkah 2 : teliti dan cermati pencantuman jumlah pendapatan yang meliputi :
 - (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan;
 - (b) Pencantuman jumlah kelompok pendapatan asli desa, kelompok transfer dan kelompok pendapatan lain;
- Langkah 3 : simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

b) Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya :

- paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif RT dan RW,
 2. pelaksanaan pembangunan desa,
 3. pembinaan kemasyarakatan desa, dan
 4. pemberdayaan masyarakat desa.
- paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Petinggi, Carik dan Perangkat Desa lainnya; dan

2. tunjangan dan operasional BPD.

- perhitungan belanja desa adalah di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok;
- hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Petinggi, Carik dan Perangkat Desa lainnya;
- pencantuman anggaran per bidang belanja telah disesuaikan dengan klasifikasi bidang belanjanya sebagai berikut :
 1. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. bidang pembangunan desa;
 3. bidang kemasyarakatan desa;
 4. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
 5. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja dirinci menurut jenis belanjanya yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja.

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;
- Langkah 4 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- (1) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan;
- (2) penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- (3) penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah evaluasi pembiayaan:

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan surplus;
- Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa;
- Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APB Desa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya;
- Langkah 6 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah desa untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah desa dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :

- a) evaluasi atas sistem APB Desa/perubahan APB Desa, dan
- b) evaluasi atas substansi APB Desa/perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi oleh Camat terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada :

- a. Bupati Jepara cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara.
- b. Inspektur Kabupaten Jepara.
- c. Petinggi, dan
- d. Ketua BPD.

F. Contoh Format Keputusan Camat :



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN ...

Jl. ... No. ... Telp. ...

...

KEPUTUSAN CAMAT ...
NOMOR .../... TAHUN 20XX

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ... TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20XX

CAMAT ...,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Camat melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX, agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Petinggi harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX, berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA : Dalam hal Petinggi tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT ...

.....

Tembusan :

1. Bupati Jepara cq. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Jepara;
 2. Inspektur Kabupaten Jepara;
 3. Ketua BPD ...
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT ...
 Nomor : .../... Tahun 20xx
 Tanggal : ...

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...
 TAHUN ANGGARAN 20xx

I. GAMBARAN UMUM TENTANG APB Desa

| No | Aspek/Komponen Yang Diperiksa | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|-----|--|------------|-------|---|--|
| | | Ya | Tidak | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Aspek Administrasi dan Legalitas | | | | |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari desa secara lengkap, meliputi : a. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun berkenaan b. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa c. Berita Acara Hasil Musyawarah Pembahasan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa d. Daftar Hadir Anggota BPD dalam Musyawarah Pembahasan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa e. Daftar Hadir Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pembahasan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa | | | - Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan - Keputusan BPD tentang Kesepakatan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa - Berita Acara Hasil Musyawarah Pembahasan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa - Daftar Hadir Anggota BPD dalam Musyawarah Pembahasan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang telah memenuhi syarat quorum - Daftar Hadir Pemerintah Desa dan masyarakat dalam Musyawarah Pembahasan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa | - Cermati kesesuaian pencantuman tanggal dari masing-masing berkas yang dilampirkan - Cermati pula perihal dari masing-masing berkas yang dilampirkan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---|---|---|---|--|
| 1.2 | Apakah BPD telah menyepakati Ranperdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa | | | <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan BPD tentang Kesepakatan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa - Berita Acara Hasil Musyawarah Pembahasan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa - Daftar Hadir Anggota BPD dalam Musyawarah Pembahasan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang telah memenuhi syarat quorum | <ul style="list-style-type: none"> - Cermati apakah BPD dalam musyawarah tersebut telah memenuhi quorum ($\frac{2}{3}$ anggota BPD hadir) |
| 1.3 | Apakah pengajuan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu | | | <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan BPD tentang Kesepakatan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Cermati tanggal Keputusan BPD - Berdasarkan aturan, 3 (tiga) hari setelah disepakati bersama, Ranperdes APB Desa /Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi |
| 2. | Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa | | | | |
| 2.1 | Umum | | | | |
| 2.1.1 | Apakah Ranperdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan Perdes RKP Desa/Perubahan RKP Desa tahun berkenaan | | | <ul style="list-style-type: none"> - Perdes RKP Desa/Perubahan RKP Desa tahun berkenaan | |
| 2.1.2 | Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan | | | <ul style="list-style-type: none"> - Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa - Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|--|---|---|---|---|
| 2.2 | Pendapatan | | | | |
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis | | | | |
| 2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Perdes | | | <ul style="list-style-type: none"> - Perdes Pungutan Desa (Pasar Desa, Tempat Wisata Desa, Tambatan Perahu, dll) - Perdes Penataan Tanah Milik Desa | |
| 2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer rasional, realistis dan sesuai dengan penetapannya | | | <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Gubernur tentang Alokasi Bantuan Provinsi - Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa - Perbup tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa - Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten yang diterima desa | |
| 2.3 | Belanja | | | | |
| 2.3.1 | Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan | | | <ul style="list-style-type: none"> - Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa - Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa | |
| 2.3.2 | Apakah semua belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa | | | <ul style="list-style-type: none"> - Perbup tentang Kewenangan Desa - Perdes tentang Kewenangan Desa | |
| 2.3.3 | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---|---|---|--|---|
| 2.3.4 | Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dipergunakan untuk : a. Siltap dan tunjangan Petinggi, Carik dan Perangkat Desa. b. Tunjangan dan operasional BPD. | | | | |
| 2.3.5 | Apakah siltap, tunjangan dan tambahan tunjangan untuk Petinggi, Carik dan Perangkat Desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perbup dan Perdes | | | - Perbup tentang Juknis ADD dan/atau Perbup tentang Siltap Petinggi dan Perangkat Desa serta Perdes tentang Siltap Petinggi dan Perangkat Desa | |
| 2.3.6 | Besaran tunjangan dan operasional untuk anggota BPD dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Perbup | | | - Perbup tentang Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPD | |
| 2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga) | | | - Perbup tentang standar satuan harga - Perbup tentang standar biaya masukan - Peraturan Petinggi tentang Standar Biaya dan satuan harga | |
| 2.4 | Pembiayaan | | | | |
| 2.4.1 | Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan | | | | |
| 2.4.2 | Apakah pada pos penerimaan pembiayaan terdapat silpa tahun anggaran sebelumnya | | | | |
| 2.4.3 | Apakah silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya | | | | |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---|---|---|--|---|
| 2.4.5 | Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa | | | - Peraturan Desa tentang Dana Cadangan | |
| 2.4.6 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal | | | - | |
| 2.4.7 | Apakah penyertaan modal pada BUM Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui peraturan desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha | | | - Peraturan desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa | |

II. PERUBAHAN YANG BERSIFAT REDAKSIONAL

1. ...
2. ... dst

III. KESIMPULAN

1. Ranperdes tentang APB Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
2. Petinggi harus memperbaiki ranperdes tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
3. Setelah dilakukan perbaikan, maka ranperdes tentang APB Desa dapat diundangkan oleh Carik/Plt. Carik dalam Lembaran Desa dan mulai berlaku.
4. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, 1 (satu) bendel Peraturan Desa tentang APB Desa dikirimkan kepada Bupati Jepara cq. Kepala Dinsospermades Kabupaten Jepara, dengan Pengantar Surat dari Camat untuk diklarifikasi.

CAMAT ...,

.....

BUPATI JEPARA

DIAN KRISTIANDI